



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 20 September 1999, agama **Islam**, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, disebut sebagai **Pemohon I;**

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxx, 28 April 1999, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn tanggal 17 September 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Kaur, dengan status Jejak dan Perawan;

Hal. 1 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pemohon dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Mirza dan Samsudin;
3. Bahwa, mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam Majei tidak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena ada urusan pekerjaan mendesak terikat dengan kontrak kerja di Jakarta;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak yang bernama K H, perempuan, lahir tanggal 1 Mei 2020;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak Dan Kartu Keluarga;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bintuhan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II yang bernama (Pemohon II) yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 1 Juli 2019 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

Hal. 2 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Maje dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

A. Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi surat keterangan dimisili Pemohon I Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermeterai cukup telah dinazegelen di kantor pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.1.)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermeterai cukup telah dinazegelen di kantor pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.2.);

Hal. 3 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn



B. Bukti Saksi yaitu :

1. **Saksi I**, tanggal lahir 15-01-1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2019 di Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon bernama Pemohon, saksi nikah 2 orang yang bernama Mirza dan Samsudin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah ;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **SAKSI 2**, tanggal lahir 08-08-1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019 di Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon bernama Pemohon, saksi nikah 2 orang yang bernama Mirza dan Samsudin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah ;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan Maje dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Bintuhan berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang ingin dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Juli 2019 di Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Pemohon dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 orang saksi bernama Mirza dan Samsudin;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 7 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juli 2019 di Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
4. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً...

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مَرَأَ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Hal. 8 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Artinya : “Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pernikahan termasuk kepada peristiwa penting yang harus dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi pelaksana yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana maksud pasal 1 ayat 17 dan 23 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang mencatatkan suatu perkawinan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili pelaku perkawinan dalam hal ini adalah domisili Pemohon I dan/atau Pemohon II sebagaimana maksud pasal 102 huruf b Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag. M.HI sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Hidayatullah, SHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Puspita Sari, SHI., MHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Ketua Majelis,

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hidayatullah, SHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, SHI., MHI

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	250.000,00
	PNBP	Rp	20.000,00
	panggilan		
	Redaksi	Rp	10.000,00
	Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Bhn